

Pengantar

Pertumbuhan ekonomi global tahun depan diproyeksikan lebih lambat dibandingkan tahun ini. Pelemahan tersebut disebabkan oleh potensi resesi di beberapa negara, terutama akibat inflasi yang meroket, pengetatan moneter, dan pelemahan ekonomi China akibat masih tingginya kasus COVID-19. Kondisi global tersebut juga berdampak pada kinerja ekonomi domestik tahun depan. Sebagaimana yang dipaparkan di dalam CORE Economic Outlook 2023, CORE Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan akan berkisar 4,5-5 persen. Konsumsi rumah tangga diprediksi tetap kuat meskipun akan melambat marginal akibat tekanan global. Investasi diprediksi akan kembali menjadi penyumbang kedua terbesar pertumbuhan ekonomi dan tidak banyak terganggu oleh tekanan ekonomi global. Namun, kontribusi ekspor tahun depan akan berkurang akibat penurunan permintaan dan pelemahan harga komoditas. Sementara itu, pengetatan moneter diprediksi lebih terbatas karena berkurangnya tekanan inflasi dan berkurangnya tekanan di pasar keuangan.

Kondisi ekonomi global dan domestik tersebut akan memberikan dampak yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi sektoral. Semakin tinggi keterkaitan suatu sektor dengan ekonomi global maka potensi tekanan terhadap sektor tersebut akan semakin besar, dan sebaliknya. **Berikut ini adalah ringkasan outlook beberapa sektor, yakni perbankan, pangan, energi, dan ketenagakerjaan, yang sangat vital dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun mendatang.**

Konsolidasi Sektor Perbankan

CORE Indonesia memperkirakan sektor perbankan akan terus melanjutkan proses pemulihan meskipun tidak lagi secepat tahun ini. Kinerja sektor perbankan tahun ini secara umum terus menunjukkan perbaikan dari masa pandemi COVID-19, yang ditandai dengan membaiknya beberapa indikator, seperti peningkatan realisasi kredit, dana pihak ketiga (DPK), dan penurunan *non performing loan* (NPL). Namun, potensi resesi global dan pengetatan moneter domestik dan global berpotensi memperlambat pemulihan tersebut. Berakhirnya ketentuan relaksasi

kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2023 juga akan berdampak pada kualitas kredit perbankan tahun depan. Dampaknya, perbankan akan lebih selektif dalam menyalurkan kredit, termasuk meningkatkan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang lebih memadai.

Pertumbuhan kredit bank umum terus memperlihatkan tren peningkatan dari titik terendah pada Maret 2021 yang mencapai -3 persen. Per Oktober 2022 kredit tumbuh 11,95 persen (*yoy*), hampir dua kali lipat pertumbuhan pra-pandemi, yang mencapai 6,4 persen (Oktober 2019). Ruang pertumbuhan sebenarnya masih sangat luas mengingat *loan to deposit ratio* (LDR) masih 81,22 persen (September 2022), di bawah level pra-pandemi yang berada di atas 90 persen.

Realisasi pertumbuhan kredit sejalan dengan pemulihan berbagai sektor ekonomi. Beberapa sektor bahkan mencatatkan pertumbuhan di atas 10 persen, yaitu pertambangan, jasa keuangan, informasi dan komunikasi, dan industri pengolahan. Pertumbuhan ini tidak lepas dari meningkatnya investasi di sektor pertambangan dan industri pengolahan CPO, akibat meningkatkan harga kedua komoditas tersebut di pasar global. Namun, beberapa sektor masih mengalami tekanan pasca pandemi (*scarring effect*) sebagaimana tercermin pada pertumbuhan kredit beberapa sektor masih di bawah pra-pandemi, seperti konstruksi, transportasi dan perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman. Adapun kredit rumah tangga, yang ditunjukkan oleh kredit pembelian barang-barang tahan lama seperti properti dan kendaraan, juga telah tumbuh di atas pra-pandemi, menandakan semakin pulihnya tingkat konsumsi masyarakat (Tabel 1).

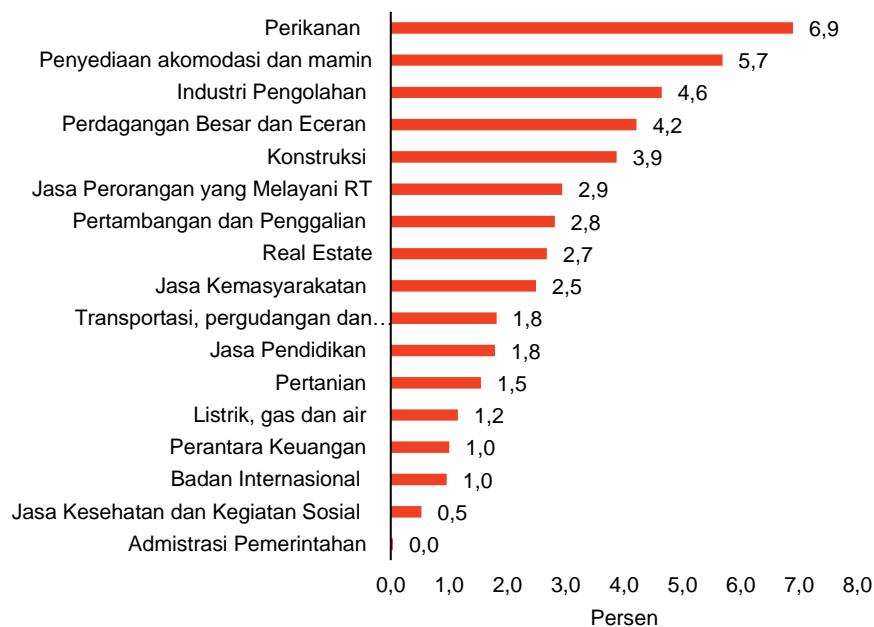
Tabel 1. Pertumbuhan Kredit 11 Sektor Terbesar dan Rumah Tangga (*yoy*)

Sektor	Nilai Kredit Okt-22 (Rp Triliun)	Pertumbuhan Kredit (%)				Selisih Okt 2022 dan Okt 2019 (%)
		Okt-2019	Okt-2020	Okt-2021	Okt-2022	
Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha	4.519	6,6	-1,2	2,7	13,0	6,3
Perdagangan Besar dan Eceran	1.068	3,8	-5,9	2,0	9,8	6,0
Industri Pengolahan	1.015	3,2	-0,8	1,2	15,1	11,9
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	473	6,7	4,6	7,2	9,9	3,3
Konstruksi	405	18,8	3,3	0,4	6,4	-12,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	275	6,0	-11,1	0,4	28,8	22,8
Pertambangan dan Penggalian	219	-2,2	4,5	2,6	68,9	71,1
Real Estate	200	6,3	4,9	-0,3	16,0	9,7
Transportasi dan Perdagangan	178	9,7	7,5	6,5	2,7	-7,0
Informasi dan komunikasi	168	12,0	10,2	26,9	24,9	12,9
Pengadaan Listrik dan Gas	147	16,0	-12,6	-1,4	-9,9	-25,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	127	8,4	9,7	3,1	3,3	-5,1
Pinjaman Rumah Tangga	1.796	6,6	0,1	3,8	8,7	2,1

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pertumbuhan industri perbankan juga ditopang dengan menurunnya risiko usaha di sektor riil sebagaimana yang tercermin pada tingkat *non performing loan* (NPL) yang terus menurun, yang mencapai 2,9 persen per Agustus 2022. Meskipun demikian, angka itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan level pra-pandemi, yaitu 2,5 persen (Desember 2019), disebabkan beberapa sektor masih cukup terdampak pandemi, seperti sektor perikanan, dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman (Grafik 1). Meredanya NPL tersebut juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang masih melanjutkan insentif kebijakan berupa restrukturisasi kredit usaha yang terdampak COVID-19.

Grafik 1. Persentase NPL Lapangan Usaha, Agustus 2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah

Di samping peningkatan realisasi penyaluran kredit, membaiknya kinerja sektor perbankan juga ditopang dengan tren peningkatan *net interest margin* (NIM), atau rasio laba bersih atas aset produktif. Pada kuartal III-2022 rata-rata NIM perbankan telah mencapai 4,73 persen, melampaui rata-rata tahun 2020 dan 2021. NIM tersebut berpotensi lebih tinggi pada akhir tahun ini hingga tahun depan. Hal ini sejalan dengan respons perbankan terhadap peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Perbankan diperkirakan akan lebih sensitif menaikkan suku bunga kredit dibandingkan dengan suku bunga deposito. Hal ini berkebalikan dengan penurunan suku bunga acuan, dimana suku bunga deposito lebih sensitif dibandingkan dengan penurunan suku bunga kredit.

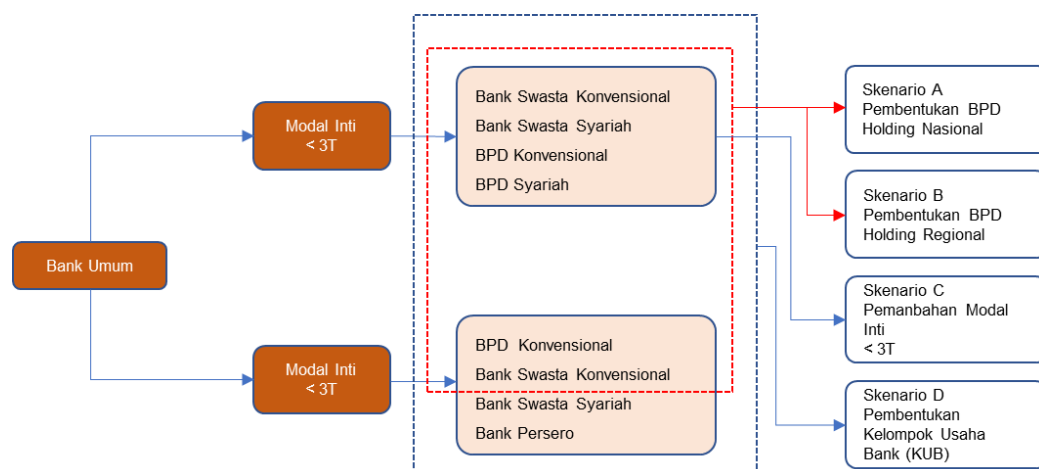
CORE memperkirakan kinerja positif industri perbankan pada 2022 masih akan berlanjut pada tahun depan meskipun tidak sekencang tahun ini. Beberapa risiko yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan sektor ini di tahun mendatang antara lain:

Pertama, pengetatan moneter Bank Indonesia tahun ini, yang diperkirakan akan berlanjut hingga awal tahun depan sejalan dengan pengetatan moneter global, akan berimbas pada kenaikan suku kredit perbankan. Dengan demikian, risiko kredit berpotensi meningkat. Per Agustus 2022, meskipun secara umum *non performing loan* (NPL) telah turun dibandingkan tahun lalu, namun beberapa sektor masih memiliki tingkat NPL yang relatif tinggi, yaitu perikanan (6,9%), industri pengolahan (4,6%), perdagangan (4,2%), dan penyediaan akomodasi (5,7%). Dengan pengetatan moneter tersebut ditambah dengan potensi pelemahan ekonomi global dan domestik, risiko kredit pada sektor-sektor tersebut berpotensi meningkat pada tahun mendatang.

Kedua, pengetatan moneter BI dalam bentuk penyesuaian secara bertahap giro wajib minimum berpotensi menurunkan tingkat likuiditas perbankan, sehingga pada akhirnya akan menurunkan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit dan pembelian surat berharga. Di sisi lain, prospek ekonomi global yang tidak secerah tahun ini menyebabkan realisasi kredit tahun depan diperkirakan melambat, terutama sektor-sektor yang terdampak secara langsung, seperti sektor pertambangan dan sektor manufaktur yang berorientasi ekspor. Peningkatan potensi kredit macet akan mendorong perbankan meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sehingga potensi penerimaan sektor perbankan menjadi lebih rendah.

Ketiga, salah satu aturan yang cukup berdampak pada sektor perbankan pada tahun 2023 adalah Peraturan OJK No. 12 tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Aturan ini mewajibkan perbankan memiliki modal inti dari minimal Rp 100 miliar menjadi minimal sebesar Rp 1 triliun pada 2020, lalu naik menjadi Rp 2 triliun pada 2021 dan Rp 3 triliun pada 2022. Aturan yang bertujuan untuk mempercepat proses konsolidasi industri perbankan tersebut telah mendorong bank-bank kecil untuk melakukan penambahan modal baik dalam bentuk *right issue*, merger, dan akuisisi. Bank-bank yang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut terpaksa dimerger, dilikuidasi, atau diturunkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan cakupan usaha yang lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum. Meskipun demikian, dalam jangka panjang, konsolidasi tersebut akan memperkuat daya tahan perbankan dalam menghadapi risiko, meningkatkan efisiensi operasional, seperti peningkatan skala operasional, peningkatan jangkauan pasar; serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi persaingan yang semakin tinggi. Salah satunya adalah peningkatan penetrasi perusahaan finansial teknologi yang beririsan dengan segmen layanan bank, seperti pembiayaan dan pembayaran.

Grafik 2. Skenario Konsolidasi Perbankan



Sumber: Bank Indonesia (BI)

Keempat, sejalan dengan meningkatnya permintaan jasa perbankan digital, yang menawarkan berbagai keuntungan seperti biaya yang lebih rendah, kemudahan dalam bertransaksi, dan kecepatan dalam memberikan layanan kepada nasabah, risiko keamanan juga akan semakin tinggi, seperti kebocoran data nasabah yang terkait dengan *fraud*, khususnya bagi perbankan yang masih belum optimal dalam mengembangkan infrastruktur keamanan layanan digitalnya. Di samping itu, masih lemahnya literasi masyarakat mengenai layanan digital menyebabkan maraknya kegiatan pencurian data dengan metode *phishing*, yaitu menipu atau mengelabui seseorang agar memberikan informasi pribadi atau data-data sensitif seperti *username*, *password*, nomor kartu kredit, dan lain-lain.

Transisi ke Energi Baru Terbarukan

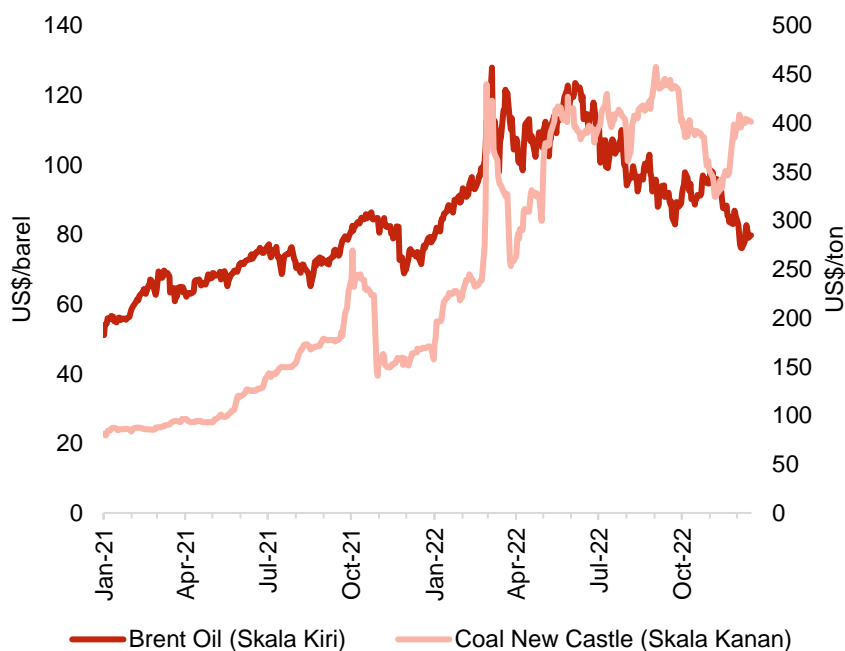
Perkembangan harga energi global tahun depan sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini. Pertumbuhan ekonomi China yang menjadi konsumen energi global terbesar, akan dipengaruhi oleh dampak pelonggaran kebijakan *zero tolerance* terhadap COVID-19 pada tahun depan. Semakin longgar penanganan tersebut maka pemulihan mobilitas masyarakat dan *supply chain* akan berdampak pada peningkatan konsumsi energi.

Di samping itu, harga energi minyak mentah masih akan dipengaruhi oleh keberlanjutan perang Rusia-Ukraina dan respons kebijakan negara-negara Eropa terhadap perang tersebut. Salah satunya adalah pemberian sanksi Uni Eropa, Australia, dan G7 kepada Rusia berupa pembatasan harga impor minyak mentah Rusia yang berpotensi menurunkan harga komoditas itu di pasar global. Pengaturan produksi negara-negara produsen, khususnya yang tergabung dalam OPEC Plus, terhadap

fluktuasi harga minyak, di samping motif untuk mempertahankan pendapatan, juga akan sangat dipengaruhi oleh tekanan politik dari negara-negara besar, seperti Amerika Serikat. Namun, realisasi pertumbuhan ekonomi global, terutama negara-negara berkembang seperti China, merupakan faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi harga minyak mentah tahun depan.

Batu bara menjadi salah satu komoditas yang mengalami lompatan tajam selama 2022. Pada pertengahan Desember harganya telah mencapai US\$400 per ton atau naik 136 persen dari tahun lalu (ytd). Penurunan produksi global, seperti Amerika Serikat dan China, dan perang Rusia-Ukraina yang mendorong konversi minyak mentah dan gas ke batu bara, telah mendorong kenaikan signifikan komoditas tersebut. Setelah sempat turun pada level US\$ 324 pada pertengahan November, akibat lesunya proyeksi ekonomi global, penurunan produksi batu bara di Australia akibat peningkatan curah hujan, kembali menggerakkan komoditas itu ke level US\$ 400 per ton (Grafik 3).

Harga batu bara tahun depan akan sangat dipengaruhi oleh prospek perekonomian negara-negara berkembang, khususnya China, yang pada tahun 2019, sebelum pandemi mengonsumsi 54 persen batu bara global. Jika pemerintah China melakukan pelonggaran penanganan COVID-19 di China, yang kembali mendorong kenaikan permintaan energi, permintaan komoditas energi global akan kembali terdongkrak. Namun, pertumbuhan ekonomi China yang melambat tahun depan menyebabkan permintaan energi tersebut belum tentu akan setinggi dibandingkan masa pra-pandemi. Rencana pemerintah China untuk mendorong produksi domestik batu bara hingga 2025—setelah mengalami krisis energi tahun lalu—berpotensi mendorong pelemahan harga emas hitam itu, meskipun diperkirakan belum akan kembali ke level pra-pandemi.

Grafik 3. Harga Rata-rata Minyak Mentah dan Batu Bara 2019-2022

Sumber: Investing.com

Tingginya harga energi di pasar global memberikan dampak bervariasi bagi konsumen domestik. Pemerintah Indonesia sendiri sudah menegaskan bahwa pada APBN 2023 *lifting* minyak diharapkan sekitar 660 ribu barel, sementara perkiraan konsumsi minyak mentah diperkirakan akan melampaui 1,5 juta ton. Dengan demikian, meskipun pemerintah telah menaikkan harga BBM tahun ini, pengeluaran APBN untuk melakukan impor masih akan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan dari produksi domestik yang cenderung menurun.

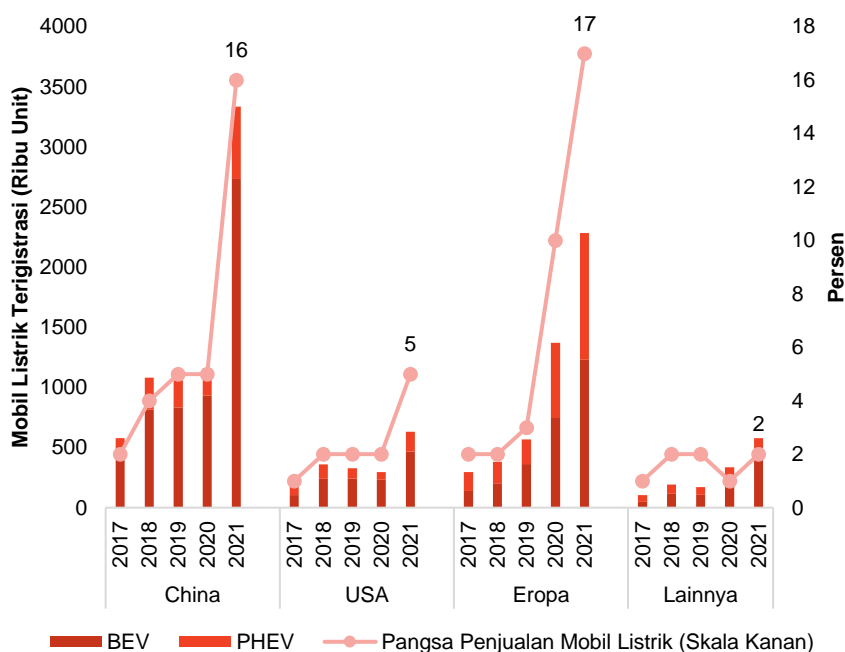
Pemberian kompensasi dan subsidi pada beberapa produk BBM yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia menjadikan tekanan kenaikan energi di pasar global terhadap inflasi domestik relatif terkendali. Di samping itu, harga batu bara yang masih tinggi tersebut tidak banyak mempengaruhi harga pokok produksi listrik (HPP) PLN. Sebabnya, pemerintah telah menetapkan harga batu bara untuk kelistrikan sebesar US\$ 70 per ton, jauh di bawah harga batu bara internasional. Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah negara yang melepaskan harga energi mereka ke pasar global, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Lonjakan inflasi energi telah menekan ekonomi mereka dengan signifikan sebelum ekonomi mereka benar-benar pulih dari pandemi.

CORE berpandangan sektor pertambangan energi tahun depan relatif tidak banyak mengalami perubahan, meskipun secara natural harganya akan mengalami fluktuasi akibat perubahan permintaan dan pasokan. Namun, dalam jangka menengah, kebijakan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan

(EBT) di berbagai negara akan semakin intensif sehingga akan berpengaruh kepada struktur pasokan dan permintaan energi. Meningkatnya produksi EBT akan menurunkan permintaan global pada konsumsi energi fosil, khususnya minyak mentah dan batu bara. Namun, proses tersebut akan berlangsung secara gradual mengikuti kecepatan pemerintah di berbagai negara dalam melakukan transisi konsumsi energi fosil ke energi non-fosil. Pemerintah Indonesia, misalnya, telah menetapkan bauran EBT sebesar mencapai 23 persen pada 2030, serta target *zero emission* pada 2060. Namun, dalam beberapa tahun terakhir pencapaian bauran energi nasional masih di bawah target. Pada tahun 2021, misalnya, capaian bauran EBT baru 11,5%, jauh di bawah target tahun itu sebesar 14,5%

Di samping itu, semakin pesatnya pertumbuhan penjualan mobil listrik dan semakin tinggi tingkat efisiensi produk tersebut menyebabkan tren penurunan permintaan bahan bakar untuk transportasi. Di berbagai negara pangsa pasar mobil listrik secara konsisten mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, pangsa pasar mobil listrik yang teregistrasi di China sebesar mencapai 16 persen, sementara di AS dan Eropa masing-masing sebesar 5 persen dan 17 persen (Grafik 4).

Grafik 4. Registrasi dan Pangsa Penjualan Mobil Listrik di China, Amerika Serikat, Eropa, dan Wilayah Lain, 2017-2021



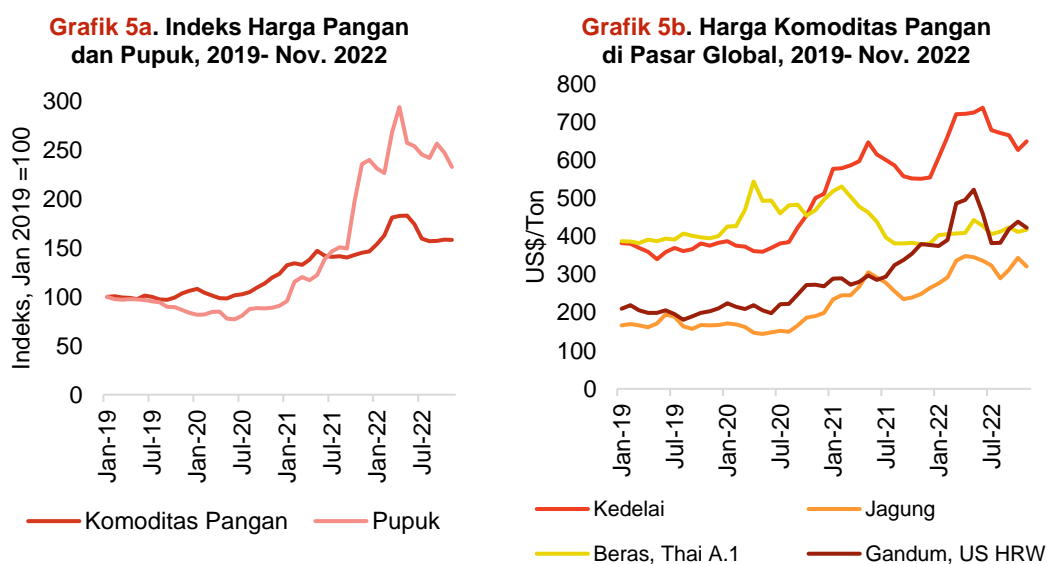
Sumber: International Energy Agency

Fluktuasi Harga Pangan Global

Pada tahun 2022, harga pangan global mengalami tren peningkatan akibat berlanjutnya peningkatan permintaan global pasca pandemi dan meningkatnya harga

energi yang berdampak pada peningkatan biaya produksi dan logistik pangan. Eskalasi perang Rusia-Ukraina, dua negara produsen utama sereal di pasar global, juga mendorong kenaikan signifikan harga pangan pada paruh pertama tahun ini (Grafik 5). Peringatan mengenai ancaman krisis pangan oleh FAO tahun 2020 yang kemudian diulangi lagi pada tahun 2021, telah mendorong pemerintah untuk mengencangkan berbagai program pertanian, termasuk *food estate*. Peringatan tersebut juga mendorong negara-negara produsen mengurangi ekspor dalam rangka meningkatkan stok mereka, sehingga ikut mendorong kenaikan harga di pasar global.

Namun, pada paruh kedua tahun ini, harga pangan sedikit menurun meskipun masih di atas level pra-pandemi (Grafik 5). Kesepakatan Rusia dan Ukraina, yang difasilitasi oleh PBB dan Turki, untuk membuka kembali jalur perdagangan di Laut Hitam, mendorong penurunan harga komoditas pangan di pasar berjangka. Di saat yang sama, pasokan beberapa komoditas pangan meningkat pada paruh kedua tahun ini akibat La Niña yang meningkatkan curah hujan di beberapa sentra produksi. Di antaranya adalah peningkatan produksi gandum di Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat.



Sumber: World Bank

Di dalam negeri, harga komoditas perkebunan yang masih tinggi tahun ini mendorong kenaikan nilai tukar petani perkebunan, khususnya petani sawit dan kopi. Sementara itu, komoditas pertanian lainnya relatif stabil, kecuali harga beras yang mengalami peningkatan sejak bulan Agustus akibat penurunan pasokan domestik. Berdasarkan perhitungan BPS, produksi padi yang dikonversi ke beras pada Januari–September 2022 sebanyak 26,17 juta ton beras, turun sebesar 57,7 ribu ton (0,2 persen) dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 26,23 juta ton.

CORE berpandangan bahwa pada tahun 2023 terdapat beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi harga pangan global dan domestik.

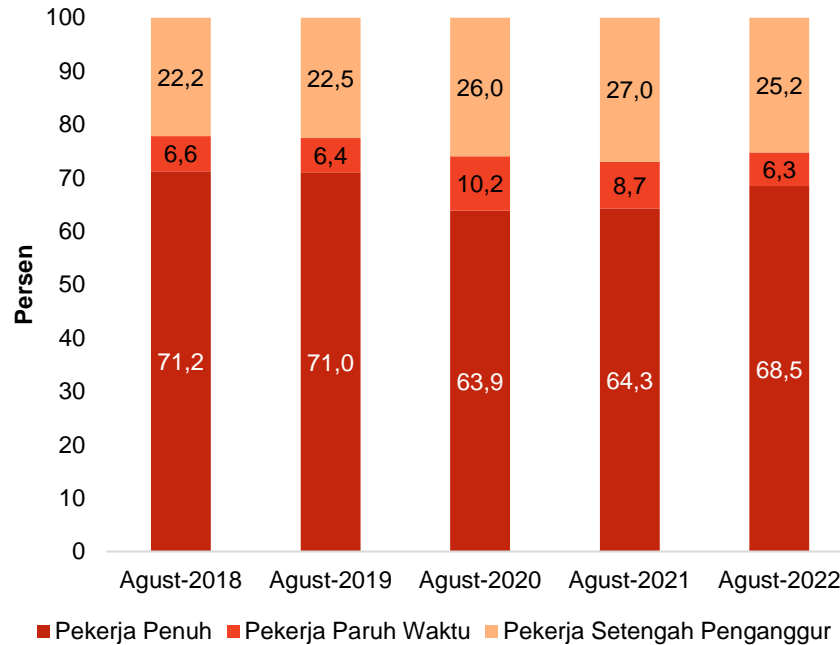
Pertama, pertumbuhan ekonomi global, yang mengarah kepada resesi berpeluang menurunkan daya beli masyarakat khususnya masyarakat menengah bawah. Kemudian, pengetatan moneter AS telah berdampak pada penguatan nilai dolar AS terhadap mata uang negara lain. Dengan demikian, harga impor pangan khususnya negara-negara berkembang menjadi semakin mahal. Tekanan inflasi di berbagai negara akibat masih tingginya harga energi dan komoditas, meskipun telah turun dari puncaknya, menyebabkan daya beli masyarakat tertekan.

Kedua, Periode La Niña, yang akan meningkatkan curah hujan di beberapa wilayah produsen pangan seperti Australia dan Asia Tenggara, dan sebagian Amerika Utara, akan berlangsung hingga awal tahun depan. La Niña terjadi ketika angin di selatan Ekuator mengalir ke arah barat, yang menyebabkan air laut di sekitar perairan selatan Ekuator menjadi lebih dingin daripada biasanya. Hal ini dapat menyebabkan perubahan cuaca di berbagai wilayah di seluruh dunia, termasuk perubahan iklim, curah hujan, dan kekeringan. Dengan demikian, potensi peningkatan produksi dapat terjadi di wilayah-wilayah tersebut, meskipun pada saat yang sama intensitas curah hujan yang tinggi berpotensi mengakibatkan banjir sehingga menghambat panen dan transportasi.

Ketiga, penurunan harga komoditas energi akan menurunkan biaya produksi pangan. Sepanjang tahun 2022 harga energi dan pupuk yang menjadi komponen biaya produksi dan transportasi pangan mengalami kenaikan tajam, sehingga berdampak pada naiknya harga pangan. Kenaikan harga tersebut berimbas pada meningkatnya harga pupuk, khususnya urea dan amonium nitrat, yang bahan bakunya dari gas alam. Karena itu, jika tren penurunan harga energi dapat berlangsung hingga tahun depan maka biaya input dari produksi pangan akan ikut terpankas sehingga harganya akan lebih rendah dibandingkan daripada tahun ini.

Disrupsi Teknologi di Pasar Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2022, masih sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Penyerapan tenaga kerja formal di beberapa sektor masih di bawah pra-pandemi. Masih rendahnya kapasitas tersebut terlihat dari jumlah pekerja setengah penganggur yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan masa pra-pandemi (Grafik 5). Kebijakan restrukturisasi kredit dan beberapa bantuan pemerintah, sedikit mampu mengurangi kedalaman tekanan yang dialami oleh pelaku usaha, khususnya kategori UMKM.

Grafik 6. Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Jam Kerja

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Di samping itu, menurunnya daya beli negara-negara yang selama ini menjadi pasar ekspor Indonesia berdampak pada penurunan permintaan atas produk ekspor Indonesia. Hal tersebut kemudian berdampak pada peningkatan PHK, khususnya pada sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki. Kebijakan Permenaker 18 tahun 2022 tentang perubahan formula perhitungan kenaikan upah berpotensi mendorong lebih banyak PHK. Semakin tingginya upah di pusat-pusat industri juga telah mendorong relokasi perusahaan ke luar dari Indonesia atau provinsi lain yang memiliki tingkat upah yang lebih rendah. Karena itu, konsistensi pada Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 dianggap menjadi solusi mengurangi tekanan di sektor ketenagakerjaan.

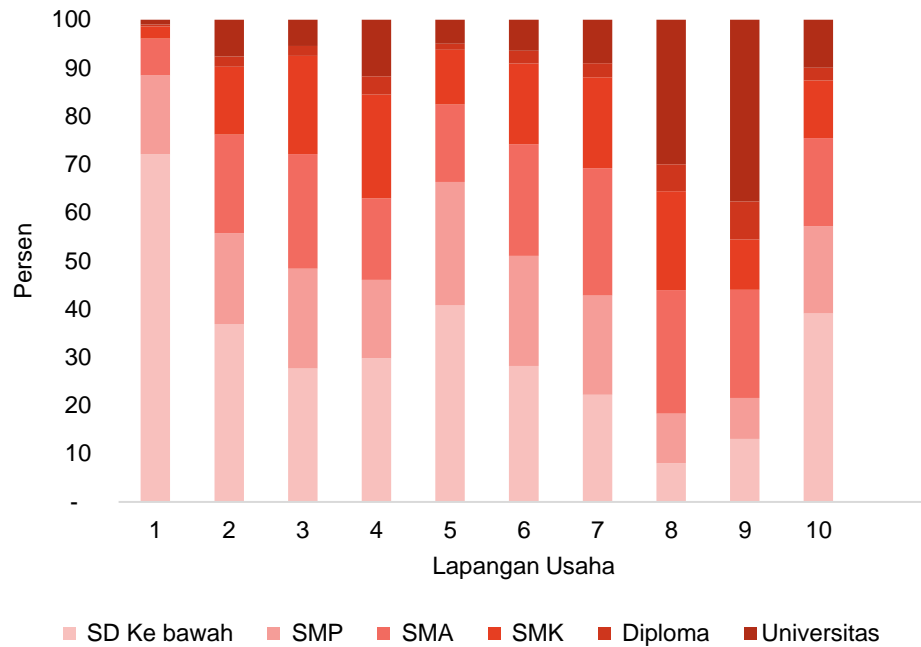
Kinerja beberapa perusahaan *startup* yang tidak begitu menggembirakan juga menjadi penyumbang meningkatnya pengangguran tahun ini. Injeksi modal dari *venture capital* yang selama ini mendukung permodalan sejumlah *startup* mulai menyusut lantaran mereka ikut tertekan akibat kenaikan suku bunga kredit di level global. Fundamental *startup* yang menurun akibat berkurangnya permintaan yang meningkat selama masa pandemi juga menjadi sebab pemangkasannya karyawan tersebut.

Permintaan tenaga kerja pada tahun depan akan dipengaruhi tingkat kedalaman resesi global dan daya tahan ekonomi domestik menghadapi resesi global. Permintaan ekspor yang turun, harga komoditas yang merosot, serta permintaan domestik yang sedikit melemah, akan berdampak terutama pada perusahaan-perusahaan yang memiliki

margin kecil dan tingkat kompetisi yang tinggi. Mereka berpeluang melakukan efisiensi yang lebih besar, termasuk pengurangan jumlah karyawan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan akan cenderung memilih tenaga kerja yang sudah siap dari aspek *skill*, untuk mengurangi biaya pendidikan dan pelatihan, sehingga produktivitas mereka tetap tumbuh. Perubahan-perubahan mengenai pengaturan tingkat upah juga menjadi kendala perusahaan dalam penyusunan strategi perencanaan usaha di masa mendatang.

Dalam jangka menengah, perkembangan teknologi yang sangat pesat ikut berdampak pada permintaan tenaga kerja. Beberapa kemajuan teknologi, seperti *artificial intelligence, supercomputing, robotic, neuro-technology, 3D printing*, dan *cybersecurity*, telah mampu menggeser sebagian peran manusia di dalam menjalankan berbagai bidang usaha. Pekerjaan yang bersifat pengulangan, efisiensinya rendah, mudah untuk diotomatisasi, dan rawan terhadap permintaan yang berfluktuasi, paling rentan mengalami transformasi permintaan tenaga kerja orang ke mesin. Beberapa pekerjaan akan mengalami pertumbuhan permintaan, sementara yang lain akan turun atau bahkan hilang. Dengan demikian, jenis pendidikan dan *skill* yang dibutuhkan juga akan bertransformasi. Beberapa *skill* yang akan tumbuh cukup pesat dalam jangka menengah, antara lain keahlian teknis, digital/IT, *critical thinking*, pemecahan masalah yang kompleks, penilaian dan pengambilan keputusan, dan *skill-skill* yang bersifat sosial. Karena itu, perbedaan dalam penguasaan *skill* tersebut, akan berpengaruh pada peningkatan ketidakpastian pekerjaan dan pendapatan, serta perubahan kebutuhan hukum tenaga kerja yang lebih relevan.

Namun, salah satu tantangan terbesar pasar tenaga kerja Indonesia saat ini adalah angkatan kerja yang didominasi pendidikan menengah ke bawah dan *mismatch* lulusan pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar. Pada Februari 2022, jumlah tenaga kerja yang berpendidikan SMP ke bawah mencapai 57 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2013 dan 2018 yang masing-masing mencapai 66 persen dan 60 persen. Penurunan marginal tersebut sejalan dengan peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan menengah dan tinggi. Sayangnya, tingginya pengangguran di tingkat pendidikan menengah khususnya vokasi menunjukkan bahwa kualitas output pendidikan menengah belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri yang juga mengeluhkan sulitnya mendapat tenaga kerja yang sesuai kebutuhan mereka.

Grafik 7. Pendidikan Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Usaha, Februari 2022

Keterangan: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2. Penambangan dan Penggalian; 3. Manufaktur; 4. Utilitas; 5. Konstruksi; 6. Perdagangan, Perbaikan Kendaraan; Layanan Akomodasi dan Makanan; 7. Transportasi dan Penyimpanan; Informasi dan Komunikasi; 8. Jasa Keuangan dan Asuransi; 9. Jasa Lainnya; 10. Total

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Karena itu, CORE memandang bahwa aturan yang jelas mengenai tingkat upah perlu diselaraskan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja juga perlu dipenuhi, baik gaji ataupun perlindungan sosial mereka. Data BPS menyebutkan per Februari 2022, sebanyak 50,61 persen tenaga kerja di Indonesia mendapatkan upah di bawah upah minimum provinsi (UMP). Karena itu, negosiasi antara pihak pemerintah, pekerja dan pemerintah untuk menyesuaikan tingkat upah sesuai dengan kondisi perusahaan yang mengalami tekanan dapat menjadi solusi ketika terjadi pelemahan ekonomi. Dari sisi pekerja dan para *stakeholder* yang menyiapkan tenaga kerja, peningkatan *hard-skill* dan *soft skill* dalam menghadapi ketatnya permintaan tenaga kerja akibat efisiensi dan disrupsi teknologi menjadi semakin mendesak.

Kemudian, di samping terus mempermudah akses penduduk untuk mendapatkan pendidikan menengah dan tinggi, pemerintah perlu memperbaiki kualitas lembaga pendidikan formal dan informal. Salah satunya adalah membenahi Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Diklat Industri (BDI). Alokasi anggaran Kartu Pra Kerja yang mencapai Rp 11 triliun pada 2022, yang selama ini hanya berbasis pelatihan visual, sebagian dapat disalurkan melalui lembaga pendidikan tersebut. Dengan masifnya

pelatihan *skilling*, *upskilling*, dan *reskilling* angkatan kerja yang tersertifikasi maka *mismatch* antara output lembaga pendidikan dan kebutuhan pasar yang terus berkembang dapat diminimalkan. []

Editor:


Muhammad Ishak Razak, S.E., M.A. | Dwi Setyorini, S.E.

Narasumber:

A. Akbar Susamto, Ph.D | Adi Mahfudz Wuhadji | Dr. Etikah Karyani |
Singgih Widagdo, LL.M | Prof. Dwi Andreas Santosa

**SOHO Pancoran**

Tower Splendor Lt. 28 Unit 2817
Jl. MT Haryono Kav. 2-3
Jakarta Selatan 12810

 www.coreindonesia.org

 [CORE.Indonesia](https://www.facebook.com/CORE.Indonesia)

 [CORE Indonesia](https://www.youtube.com/COREIndonesia)

 [@COREIndonesia](https://twitter.com/COREIndonesia)

 [core_indonesia](https://www.instagram.com/core_indonesia)